

DANA PENDIDIKAN DI KARANGANYAR DPRD Desak Tetap 20 Persen

KARANGANYAR (KR) - Pengalokasian dana pendidikan bersumber APBD Kabupaten Karanganyar sebesar 20 persen belum terwujud. DPRD Kabupaten Karanganyar mendesak Pemkab setempat memulihkan porsi itu.

Anggota DPRD Karanganyar dari Komisi D, Endang Muryani mengatakan porsi tersebut tidak terpenuhi selama tiga tahun anggaran terakhir.

Menurutnya, saat hearing dengan tim anggaran, Pemkab Karanganyar beralasan keuangan tidak mencukupi. Endang menyebut pengalokasian ideal diamanahkan UUD 1945, yakni pada pasal 31 ayat 4 amandemen keempat.

Ia juga menyayangkan alasan Pemkab tak rasional. "Alasannya tak ada anggaran. Tapi kenapa bangun gedung perkantoran di sejumlah OPD bisa terlaksana? Bangun gedung kantor habis miliaran rupiah," ungkap Endang, Senin (10/7).

Idealnya, lanjut Endang, 20 persen APBD untuk dana pendidikan dapat dipakai untuk BOS Daerah. Alokasinya ke infrastruktur pendidikan, seperti rehab gedung sekolah dan kebutuhan belajar mengajar siswa dan guru.

"Penganggaran 20 persen untuk dunia pendidikan itu kembali kepada komitmen pemerintah, jika memang menginginkan dunia pendidikan di Karanganyar maju," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD, Anung Marwoko mengaku pihaknya kecolongan anggaran BOS Daerah tidak dianggarkan kembali di APBD 2023.

Karena itu, pimpinan DPRD Karanganyar akan mengupayakan anggaran BOS Daerah kembali dialokasikan pada APBD Perubahan nanti.

"Kami akan kejar di perubahan nanti. Kami benar-benar kecolongan, tidak ada laporan tenaga pendidikan soal dana BOS yang disetop," kata Anung.

Menurutnya, keterbatasan anggaran karena covid-19 bukan lagi menjadi alasan bagi Pemkab tidak mengalokasikan kembali BOS daerah.

Apalagi proyek-proyek dengan melenan anggaran besar bisa dikerjakan Pemkab di tahun ini. Sangat memungkinkan anggaran BOS daerah dialokasikan dalam APBD Perubahan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Yopi Eka Jatiwibowo membenarkan anggaran BOS Daerah tidak dialokasikan lagi dalam APBDa Karanganyar.

Bahkan BOS Daerah sudah disetop selama tiga tahun. "Sudah dihentikan sejak Covid-19. Belum ada instruksi penganggarnya lagi," jelasnya. (Lim)-f

RAPAT PARIPURNA DPRD SUKOHARJO

APBD 2022 Disetujui Menjadi Perda

SUKOHARJO (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kepastian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama, Senin (10/7) di gedung DPRD Sukoharjo.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 bahwa Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 304.412.025.326. Silpa inilah yang dibahas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bupati, menyatakan apresiasi atas beberapa pendapat,

saran dan imbauan yang disampaikan oleh para anggota DPRD, baik melalui pandangan umum, rapat-rapat badan anggaran, rapat-rapat komisi, dan rapat paripurna. "Kekurangan dan kelemahan akan selalu kami perbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Sekretaris DPRD Sukoharjo, Basuki Budi Santoso saat membacakan kesimpulan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022. Prestasi tersebut

diharapkan bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. "Badan Anggaran mengharapkan agar ke depan sinergitas antar-OPD lebih ditingkatkan sehingga penganggaran lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Badan Anggaran merekomendasikan kepada Bagian Perekonomian Setda selaku Koordinator BUMD agar memberikan pembinaan BUMD dan perbankan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dua lembaga tersebut diminta lebih profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih terintegrasi.

"Badan Anggaran juga merekomendasikan kepada BPPAD berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Ka-

wasan Permukiman serta Kantor ATR/BPN Wilayah Sukoharjo untuk pertimbangan dalam menentukan besaran target BPHTB," jelasnya.

Terkait Sewa Lahan Pertanian bekas Bondo Desa di Wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari,

dinilai sudah sesuai dengan Nilai Limit yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa. (Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibadri

Serah-terima nota persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 menjadi Perda.

RAPAT PARIPURNA DPRD TEMANGGUNG

Diusulkan, Pemberhentian Bupati-Wabup

TEMANGGUNG (KR) - DPRD Kabupaten Temanggung mengusulkan pemberhentian Bupati Al Khadziq dan Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo dalam suatu sidang paripurna, Senin (10/7). Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yunianto mengatakan usulan pemberhentian itu karena masa jabatan bupati dan wakil bupati akan berakhir 24 September 2023.

"Dua bulan sebelum masa jabatan berakhir, sesuai regulasi, DPRD menyam-

paikan pengusulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur," jelas Yunianto. Melalui sidang paripurna, juga disampaikan pengumuman akan segera berakhirnya masa jabatan Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2018-2023. Pengumuman dimaksud agar masyarakat luas mengetahuinya.

Bupati Temanggung Al Khadziq juga mengatakan, dua bulan ke depan akan mengakhiri perjalanan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Disebutkan, selama lima tahun kepemimpinan di Temanggung banyak dinamika, hambatan dan

tantangan yang dihadapi. Tidak mudah pula untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

"Tujuan sasaran maupun janji-janji politik pernah kami suarakan kepada seluruh masyarakat Temanggung. Tentu menjadi tanggungjawab kami untuk mewujudkan dan merealisasikannya, berkat dukungan DPRD dan segenap komponen masyarakat, dan semua stakeholder untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita itu," ungkap Al Khadziq.

Menurutnya, sebagian besar visi dan misi telah dapat diwujudkan. Di antaranya insentif untuk pa-

ra Ketua RT dan Ketua RW, santunan kematian, dan insentif guru ngaji. Berbagai masalah yang dihadapi di Temanggung, antara lain persampahan, konservasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, pengembangan kepariwisataan, seni budaya, dan pembangunan pertanian.

"Permasalahan-permasalahan tersebut akan terus diselesaikan dan tidak mungkin semua itu bisa dilaksanakan dan bisa dikerjakan tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya DPRD dan Forkompinda serta stakeholder," tandas Al Khadziq. (Osy)-f



KR-Zaini Atrosyid

Penyerahan pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2018-2023.

HUKUM

Kena PHK, Gasak Pickup Mantan Juragan

SLEMAN (KR) - Petugas Unit Reskrim Polsek Ngaglik menangkap MK warga Wonosobo atas dugaan pencurian mobil pickup. Pelaku berusia 24 tahun itu, menggasak kendaraan operasional milik mantan majikannya dengan motif ekonomi.

"Pelaku mencuri karena ingin memiliki untuk dijual dan rencananya uang penjualan mobil pickup tersebut akan digunakan untuk biaya keluar Jawa. Namun belum sempat menjual barang curian, MK terlebih dahulu kami tangkap di wilayah hukum Polrestabes Semarang," ungkap Kapolsek Ngaglik, Kompol Anjar Istriani, didampingi Panit Reskrim, Ipa Udin Afriyanto, Rabu (12/7).

Kapolsek membenarkan, jika mobil yang dicuri oleh MK adalah milik Davin warga Sardonoharjo Ngaglik Sleman, yang pernah jadi atasan tersangka. "Tersangka ini pernah bekerja di tempat korban sebagai driver, namun sekitar 4-5 bulan lalu diberhentikan oleh korban," ungkapnya.

Pencurian berawal saat Selasa (4/7) sekitar pukul 02.00,

korban kembali dari Gombong setelah selesai mengantar telur ke konsumen. Setelah itu, ia dijemput karyawan kembali ke mess yang ada di Padukuhan Bekik dan langsung istirahat. Namun sekitar pukul 05.30 WIB, korban dibangunkan karyawan dan memberitahu jika pickup yang baru saja digunakan, sudah raib.

Setelah mendapatkan laporan, petugas Polsek Ngaglik langsung melakukan penyelidikan, termasuk mengamati CCTV di TKP.

Hasilnya, mendapatkan informasi jika pickup tersebut berada di wilayah Wonosobo setelah itu dilakukan pengecekan dan berkordinasi dengan Reskrim Polres Wonosobo ternyata benar adanya mobil tersebut dan langsung diamankan.

"Mobil kami sita di Wonosobo, sedangkan tersangka berhasil kami tangkap di daerah Semarang. Karena tersangka ini pernah bekerja di tempat korban, MK sudah paham betul dengan situasi di sekitar TKP sehingga memudahkannya saat beraksi," pungkas Kapolsek. (Ayu)-f



KR-Dedy EW

Korban ketika berada di kompleks koperasi yang sudah tak beroperasi.

PENGEMBANGAN KASUS MAFIA TKD

Kantor dan Rumah Kadis Dispartaru Digeledah

YOGYA (KR) - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispartaru) DIY dan rumah Kepala Dispartaru DIY, Krido Suprayitno, Rabu (12/7).

Pengegeledahan ini dalam rangka pengembangan kasus dugaan mafia Tanah Kas Desa (TKD) di Caturtunggal.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH, mengungkapkan Penyidik Kejati DIY yang terbagi dua tim melakukan pengegeledahan di Kantor Dispartaru DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta dan rumah Kepala Dispartaru DIY, Krido Suprayitno, di Ngemplak Sleman. Pengegeledahan di Kantor Dispartaru dilakukan mulai sekitar pukul 09.00 hingga 13.15.

"Ya ada dua tim yang melakukan pengegeledahan, yakni di Kantor Dispartaru DIY dan kediaman Kepala Dispartaru DIY. Pengegeledahan dilakukan secara serentak," ungkapnya.

Menurut Ashar, di Kantor Dispartaru DIY, penyidik Kejati menggeledah di ruang kerja Kepala Dispartaru dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan. Dalam pengegeledahan itu, penyidik berhasil mengamankan

ho, membenarkan adanya pengegeledahan oleh Penyidik Kejati DIY. Pengegeledahan itu dilakukan di Ruang Kantor Kepala Dispartaru dan Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan. Ada beberapa dokumen dan komputer PC yang dibawa Tim Penyidik Kejati DIY.

"Benar ada pengegeledahan dari Kejati DIY. Kami hanya memfasilitasi saja dan tidak masuk ke dalam ruangan. Dan ada beberapa dokumen dari dua ruangan dan komputer PC di ruang Kepala Dispartaru

yang dibawa," tuturnya.

Wahyu mengaku, pengegeledahan ini terkait Tanah Kas Desa. Namun pihaknya tidak tahu kasus yang mana. "Ini soal TKD. Tapi kami tidak tahu kasus yang mana," ujarnya.

Disinggung mengenai keberadaan Kepala Dispartaru, pihaknya menjelaskan, bahwa Kepala Dispartaru saat ini sedang ada diklat keistimewaan. Sehingga tidak ada di kantor. "Beliau ada acara diklat keistimewaan. Jadi saat pengegeledahan, tidak ada di kantor," pungkasnya. (Sni)-f



KR-Saifullah Nur Ichwan

Tim Penyidik saat melakukan pengegeledahan di ruang kerja Kepala Dispartaru DIY.

DIDUGA TERJADI PENYIMPANGAN

Anggota Koperasi Tegap Tuntut Keadilan

WONOSARI (KR) - Puluhan korban dugaan penyimpangan Koperasi Tegap Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menuntut adanya keadilan. Mereka mendatangi lokasi Koperasi Tegap yang sudah macet beroperasi setelah 2018 lalu.

Para korban merupakan guru dan juga pensiunan, sebanyak 25 korban menderita kerugian Rp 350 juta. Sedangkan secara keseluruhan sebanyak 250 anggota mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar.

"Korban ini menuntut Koperasi Tegap Ponjong untuk memberikan apa yang menjadi hak. Baik itu simpanan pokok hingga investasi. Karena diduga ada indikasi penyalahgunaan dana," jelas penasihat

hukum para korban, Barayudha Febrian Putra, di dampingi David Yuda Chandra MH usai melihat lokasi Koperasi Tegap Ponjong, Selasa (11/7).

Ketika mendatangi lokasi Koperasi Tegap sudah tutup, tidak beroperasi. Hanya terdapat sejumlah gedung yang sudah tidak terawat dan masih ada tulisan Koperasi Tegap.

Sebelumnya memiliki banyak usaha hingga toko material. Namun laporan tanggungjawab pengurus hanya sampai 2018 dan sampai sekarang tidak beroperasi.

"Sudah dicoba untuk mediasi dengan pengurus Koperasi Tegap, namun sampai sekarang tidak ada solusi. Para korban ini

meminta hak hak untuk dikembalikan," imbuhnya.

Pendampingan lanjutnya, juga sudah dilakukan dengan mencoba berkomunikasi dengan dinas terkait, inspektorat, Pemkab Gunungkidul maupun DIY. Harapannya nantinya bisa melakukan fasilitasi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.

Pengorbanan para guru baik yang sekarang masih aktif ataupun sudah pensiun jangan sampai disakiti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Berharap adanya fasilitasi baik dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan ini," jelasnya. (Ded)-f